



Dinamika Pertumbuhan Pariwisata dan Krisis Pengelolaan Sampah di Bali: Analisis Penyebab dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan

Wan Muthia Haznaya*¹, Zevira Amelia Lailatunadzifah², Rayi Kharisma Rajib³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

E-mail: wanhaznaya11@students.unnes.ac.id, kakakvira1@students.unnes.ac.id, rayirajib@mail.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 10, 2026

Accepted July 14, 2026

Keywords:

Environmental Governance

Environmental Policy

Sustainable Tourism

Waste Management

Bali Tourism.

ABSTRACT

The rapid growth of the tourism sector in Bali has significantly contributed to regional economic development; however, it has also intensified environmental problems, particularly waste management issues. The increasing number of tourists, expansion of tourism infrastructure, and high consumption of single-use products have led to a substantial rise in waste generation, especially plastic waste, in coastal and tourism areas. This condition indicates an imbalance between tourism development and environmental carrying capacity, thereby threatening the sustainability of Bali's tourism industry. This study aims to analyze the relationship between tourism growth and the waste management crisis in Bali, identify the factors causing ineffective waste governance, and evaluate environmental policies related to waste management in tourism areas. The research employs normative legal research with a descriptive qualitative approach using statute approach, conceptual approach, and case/policy approach. The study examines various regulations, including Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Bali Governor Regulation Number 97 of 2018 concerning Restrictions on Single-Use Plastic Waste. The findings indicate that the waste management crisis in Bali is caused not only by the increase in tourism activities but also by weak policy implementation, limited waste management infrastructure, low public awareness, and insufficient law enforcement. The study further reveals a gap between environmental regulations and their implementation in practice. This research contributes to the development of environmental law and sustainable tourism studies by offering an integrative analysis of tourism growth, waste management, and environmental governance. Strengthening policy implementation, environmental supervision, and sustainable tourism governance are essential to achieving environmentally sustainable tourism development in Bali.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 17, 2026

Revised July 10, 2026

Accepted July 14, 2026

Keywords:

Tata Kelola Lingkungan,

Kebijakan Lingkungan,

Pariwisata Berkelanjutan,

ABSTRACT

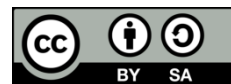
Pertumbuhan pesat sektor pariwisata di Bali telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi regional; namun, hal ini juga memperparah masalah lingkungan, khususnya masalah pengelolaan sampah. Meningkatnya jumlah wisatawan, perluasan infrastruktur pariwisata, dan tingginya konsumsi produk sekali pakai telah menyebabkan peningkatan substansial dalam produksi sampah, terutama sampah plastik, di daerah pesisir dan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pembangunan pariwisata dan daya dukung lingkungan, sehingga mengancam keberlanjutan industri pariwisata Bali. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan pariwisata dan krisis pengelolaan sampah di Bali, mengidentifikasi faktor-faktor



Pengelolaan Sampah,
Pariwisata Bali.

penyebab tata kelola sampah yang tidak efektif, dan mengevaluasi kebijakan lingkungan terkait pengelolaan sampah di daerah pariwisata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus/kebijakan. Studi ini meneliti berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai. Temuan menunjukkan bahwa krisis pengelolaan sampah di Bali bukan hanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas pariwisata, tetapi juga oleh lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya penegakan hukum. Studi ini lebih lanjut mengungkapkan adanya kesenjangan antara peraturan lingkungan dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum lingkungan dan studi pariwisata berkelanjutan dengan menawarkan analisis integratif tentang pertumbuhan pariwisata, pengelolaan sampah, dan tata kelola lingkungan. Penguatan implementasi kebijakan, pengawasan lingkungan, dan tata kelola pariwisata berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan di Bali.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Wan Muthia Haznaya*

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

E-mail: wanhaznaya11@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Bali sebagai destinasi wisata internasional yang bergantung pada sektor jasa pariwisata. Keberadaan pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur, investasi, serta penyerapan tenaga kerja (Saidah & Kusumo, 2025; Tamrin et al., 2024). Dalam perspektif hukum nasional, pengembangan pariwisata telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, serta kelestarian lingkungan hidup (Sana, 2025). Namun, pertumbuhan pariwisata Bali yang berlangsung secara masif dalam beberapa tahun terakhir justru memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara orientasi pembangunan ekonomi dan kapasitas perlindungan lingkungan (Tirta, 2023). Fenomena *overtourism*, pembangunan fasilitas wisata yang tidak terkendali, hingga meningkatnya volume sampah di kawasan wisata menunjukkan bahwa ekspansi industri pariwisata belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepariwisataan nasional.

Persoalan sampah menjadi salah satu dampak ekologis paling nyata dari meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali. Peningkatan jumlah wisatawan secara langsung berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi produk sekali pakai, limbah hotel dan restoran, serta



pencemaran kawasan pesisir dan laut (Kasta & Wijaya, 2024). Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar sampah plastik laut di dunia akibat lemahnya tata kelola sampah dan tingginya produksi limbah plastik (Purba et al., 2023). Di Bali sendiri, persoalan tersebut semakin terlihat melalui penumpukan sampah di kawasan pantai wisata, *overload* tempat pembuangan akhir, serta meningkatnya pencemaran laut yang tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga menurunkan kualitas dan citra destinasi wisata. Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tanpa penguatan sistem pengelolaan lingkungan berpotensi menimbulkan krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan pariwisata itu sendiri.

Dalam kajian perlindungan lingkungan hidup, negara sebenarnya telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga daya dukung lingkungan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerbitkan berbagai kebijakan lingkungan seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai upaya mengurangi pencemaran plastik di kawasan wisata. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha wisata, minimnya kesadaran masyarakat, hingga belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Choirisma et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan, di mana regulasi lingkungan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh pertumbuhan industri pariwisata yang semakin intensif (Ogunkan, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu keberlanjutan pariwisata di Bali, seperti eksploitasi sumber daya alam, tekanan terhadap budaya lokal, hingga pentingnya penerapan *sustainable tourism* dalam tata kelola destinasi wisata. Penelitian Sihombing (2023) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pariwisata menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan sosial budaya Bali. Sementara itu, penelitian mengenai marine debris di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengelolaan sampah dan rendahnya efektivitas kebijakan lingkungan menjadi faktor utama meningkatnya pencemaran kawasan pesisir dan laut (Purba et al., 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Esta & Wirantari (2025); Guo et al. (2024); dan Rasuh et al. (2025) masih membahas isu pertumbuhan pariwisata dan pencemaran lingkungan secara terpisah. Kajian yang secara khusus menghubungkan dinamika pertumbuhan pariwisata dengan krisis pengelolaan sampah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan daerah di Bali masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara ekspansi industri wisata, peningkatan produksi sampah, dan lemahnya implementasi regulasi lingkungan merupakan persoalan yang saling berkaitan dan memerlukan pendekatan analisis yang lebih integratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dinamika pertumbuhan pariwisata dengan meningkatnya krisis pengelolaan sampah di Bali, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya tata kelola sampah di kawasan wisata, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dalam mengatasi dampak ekologis akibat aktivitas pariwisata. Penelitian ini penting dilakukan karena menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek pertumbuhan pariwisata, pengelolaan sampah, dan implementasi kebijakan lingkungan dalam perspektif *sustainable tourism* dan



environmental governance. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dan tata kelola pariwisata berkelanjutan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan lingkungan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan di Bali.

METODE

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika pertumbuhan pariwisata dan krisis pengelolaan sampah di Bali. Pendekatan hukum normatif digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum, kebijakan lingkungan, serta implementasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *sustainable tourism*, *environmental governance*, dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan kepariwisataan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan pemerintah, data statistik pariwisata dan lingkungan, serta berbagai publikasi akademik yang relevan dengan isu pengelolaan sampah dan pembangunan pariwisata di Bali. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan konsep serta istilah yang digunakan dalam penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Peneliti mengumpulkan data berupa regulasi nasional dan daerah, laporan pengelolaan sampah, data statistik jumlah wisatawan, serta berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai pariwisata berkelanjutan dan pencemaran lingkungan di Bali. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari publikasi lembaga pemerintah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta laporan organisasi lingkungan yang berkaitan dengan persoalan sampah dan pencemaran kawasan wisata. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai data yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis secara sistematis.

D. Prosedur Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan



kesimpulan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara pertumbuhan sektor pariwisata dengan meningkatnya krisis pengelolaan sampah serta mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi lingkungan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi substansi kebijakan lingkungan dan comparative analysis untuk membandingkan antara ketentuan normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif *sustainable tourism* dan *environmental governance* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertumbuhan pariwisata dan krisis pengelolaan sampah di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan sektor pariwisata di Bali telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan tekanan ekologis yang semakin besar. Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan hotel dan restoran, serta ekspansi kawasan wisata menyebabkan meningkatnya konsumsi barang dan penggunaan produk sekali pakai yang berkontribusi terhadap kenaikan volume sampah harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan industri pariwisata memiliki hubungan langsung dengan meningkatnya beban pengelolaan lingkungan, khususnya pada kawasan wisata pesisir dan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas wisatawan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, fenomena tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara orientasi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas daya dukung lingkungan.

Pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi ekologis yang serius apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purba et al. (2023) yang menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas manusia di kawasan pesisir menjadi salah satu faktor utama meningkatnya marine debris dan pencemaran laut di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks Bali, peningkatan produksi sampah akibat aktivitas wisata memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan daya dukung lingkungan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Lemahnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis pengelolaan sampah di Bali tidak hanya disebabkan oleh tingginya produksi limbah akibat aktivitas pariwisata, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya implementasi kebijakan lingkungan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur persampahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha wisata terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kawasan wisata yang belum menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan daur ulang secara optimal. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai di sektor pariwisata juga masih cukup tinggi meskipun regulasi pembatasan telah diberlakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Dalam perspektif *environmental governance*, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta



partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sihombing (2023) yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan daya dukung ekologis daerah wisata

Analisis Penyebab Krisis Pengelolaan Sampah dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan di Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis pengelolaan sampah di Bali tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kelemahan tata kelola lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan hotel dan restoran, serta ekspansi kawasan wisata secara langsung meningkatkan konsumsi produk sekali pakai dan produksi limbah domestik maupun non-domestik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di Bali masih cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan penguatan kapasitas lingkungan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri wisata dan kesiapan sistem pengelolaan lingkungan menyebabkan daya dukung ekologis Bali mengalami tekanan yang semakin besar. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya pencemaran pantai, *overload* tempat pembuangan akhir, dan menurunnya kualitas lingkungan di sejumlah kawasan wisata utama.

Selain faktor peningkatan aktivitas pariwisata, penelitian Kasta & Wijaya (2024) dan Tirta (2023) juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur persampahan menjadi penyebab utama belum optimalnya pengelolaan sampah di Bali. Kapasitas tempat pembuangan akhir yang terbatas, minimnya fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta belum optimalnya sistem pemilahan sampah menyebabkan sebagian besar limbah masih berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa proses pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, terutama pada kawasan wisata dengan tingkat produksi sampah yang tinggi.

Penelitian Luh et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan lingkungan menjadi faktor penting yang memperburuk krisis pengelolaan sampah di Bali. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, efektivitas kebijakan tersebut masih belum optimal. Lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha wisata, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta belum konsistennya penegakan sanksi administratif menyebabkan implementasi regulasi lingkungan belum berjalan secara maksimal. Dalam perspektif *environmental governance*, efektivitas kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas institusi, pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sihombing (2023) yang menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan daya dukung ekologis kawasan wisata. Selain itu, penelitian Purba et al. (2023) juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengelolaan sampah dan rendahnya efektivitas kebijakan lingkungan menjadi faktor utama meningkatnya pencemaran laut dan marine debris di kawasan Asia Tenggara. Namun



demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Bali memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan lingkungan sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjaga pertumbuhan ekonomi pariwisata dan melakukan pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis.

Dalam evaluasi kebijakan lingkungan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan sampah di Bali pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata, peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, optimalisasi sistem pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Bali (Santini, 2023). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat integrasi antara kebijakan pariwisata dan kebijakan lingkungan agar pembangunan sektor wisata tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada perlindungan daya dukung ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Analisis Yuridis terhadap Krisis Pengelolaan Sampah dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan di Bali

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), krisis pengelolaan sampah di Bali pada dasarnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amanat regulasi lingkungan dengan realitas implementasinya di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan sektor pariwisata di Bali menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin kualitas lingkungan hidup masih belum optimal. Penumpukan sampah di kawasan wisata, pencemaran pesisir, serta *overload* tempat pembuangan akhir memperlihatkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan pembangunan wajib memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di Bali justru menghasilkan tekanan ekologis yang cukup besar akibat tingginya konsumsi produk sekali pakai, limbah hotel dan restoran, serta lemahnya sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *sustainable development* dan *precautionary principle* dalam kebijakan pariwisata daerah belum berjalan secara efektif. Secara yuridis, hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yakni antara norma hukum yang menghendaki perlindungan lingkungan hidup dengan realitas pelaksanaan kebijakan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pariwisata.

Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Bali berkaitan erat dengan lemahnya penerapan konsep *sustainable tourism* dan *environmental governance*. Konsep *sustainable tourism* menekankan



bahwa pembangunan pariwisata harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya. Namun, praktik pembangunan pariwisata di Bali masih memperlihatkan dominasi paradigma *growth-oriented tourism* yang menitikberatkan pada peningkatan jumlah wisatawan dan investasi tanpa diimbangi penguatan kapasitas lingkungan. Akibatnya, peningkatan aktivitas pariwisata justru memperbesar produksi limbah dan mempercepat degradasi ekologis kawasan wisata. Dalam perspektif *environmental governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan belum berjalan secara kolaboratif karena koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum optimal.

Selain itu, melalui pendekatan kasus/kebijakan (*case approach*), penelitian ini menemukan bahwa berbagai kebijakan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada dasarnya telah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang bertujuan mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik pada sektor usaha dan masyarakat. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha wisata, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum konsistennya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kebijakan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi publik dalam mendukung implementasi kebijakan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Bali memiliki karakteristik yang kompleks karena terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara kepentingan ekonomi pariwisata dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menghadapi dilema antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat terhadap aktivitas industri wisata. Akibatnya, kebijakan pengelolaan lingkungan cenderung mengalami kompromi ketika berhadapan dengan kepentingan investasi dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Bali bukan hanya persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan juga persoalan tata kelola kebijakan dan orientasi pembangunan daerah.

Dengan demikian, secara yuridis penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi lingkungan saja tidak cukup untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah di Bali apabila tidak diikuti dengan penguatan implementasi kebijakan, penegakan hukum lingkungan, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pariwisata daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata, meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, dan mendorong penerapan ekonomi sirkular berbasis pengurangan limbah pada kawasan wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha wisata juga perlu diperkuat melalui edukasi lingkungan dan penerapan tanggung jawab ekologis agar pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan antargenerasi.

Implikasi, Keterbatasan, dan Rekomendasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Bali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi formal, tetapi memerlukan penguatan implementasi kebijakan, pengawasan lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep *sustainable tourism* dan



environmental governance yang menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui peningkatan infrastruktur persampahan, optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha wisata, serta penguatan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan wisatawan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan data sekunder sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis kebijakan dan regulasi lingkungan tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di setiap kawasan wisata di Bali. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan observasi lapangan, wawancara, dan analisis kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dan perilaku pelaku industri pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika pertumbuhan sektor pariwisata di Bali memiliki keterkaitan yang signifikan dengan meningkatnya krisis pengelolaan sampah dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup. Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan fasilitas pariwisata, serta tingginya pola konsumsi masyarakat dan wisatawan menyebabkan volume sampah, khususnya sampah plastik, terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di Bali masih cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan penguatan kapasitas perlindungan lingkungan hidup. Akibatnya, berbagai persoalan ekologis seperti pencemaran pesisir, *overload* tempat pembuangan akhir, dan penurunan kualitas lingkungan kawasan wisata menjadi semakin sulit dikendalikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam pengelolaan lingkungan dan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha wisata, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan kebijakan lingkungan di lapangan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dan *sustainable tourism* belum berjalan secara optimal.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan dan *sustainable tourism* melalui pendekatan integratif yang menghubungkan pertumbuhan pariwisata, krisis pengelolaan sampah, dan evaluasi kebijakan lingkungan dalam perspektif environmental governance. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pelaku industri pariwisata dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha wisata, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pariwisata daerah. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab tujuan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan pariwisata dan peningkatan krisis pengelolaan sampah serta efektivitas kebijakan lingkungan dalam mengatasi persoalan tersebut.



Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif dan data sekunder sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan observasi lapangan, wawancara, dan analisis kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan lingkungan dan perilaku pelaku industri pariwisata dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirisma, Wahyuliana, I., & Boemiya, H. (2024). Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Daerah Di Bidang Kepariwisata Terkait Konsep Green Constitution Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Esta, P. V. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu “ Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025 ” Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1–9.
- Guo, Z., Li, Y., & Wales, N. S. (2024). Analysis of the Decisive Factors of Government Attracting Tourists in Public Management from the Perspective of Environmental Protection Analiza czynników decydujących o przyciąganiu turystów przez rząd w zarządzaniu publicznym z perspektywy ochrony środowiska. *Problemy Ekorozwoju – Problems Of Sustainable Development*, 19(1), 285–295.
- Kasta, I. K., & Wijaya, A. (2024). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan : Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 45–53. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.191>
- Luh, N., Ening, P., Junaedy, I. K. D., & Dewi, M. (2025). Governmentality Dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11, 503–518.
- Ogunkan, D. V. (2022). Urban Governance Achieving sustainable environmental governance in Nigeria : A review for policy consideration. *Urban Governance*, 2(1), 212–220. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.04.004>
- Purba, N. P., Pasaribu, B., Faizal, I., Martasuganda, M. K., & Ha, M. (2023). Coastal clean-up in Southeast Asia : lessons learned , challenges , and future strategies. *Frontiers in Marine Science*, December, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1250736>
- Rasuh, K., Prasada, D. K., Gorda, A. A. A. N. S., & Putra, K. S. W. (2025). Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 10378–10386.
- Saidah, I. N., & Kusumo, A. T. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Konteks Daya Dukung Lingkungan. *Social, Humanities, and Educational Studies SHEs: Conference Series* 8, 8(2), 499–509.
- Sana, I. N. L. (2025). Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), 24–36.
- Santini, P. A. W. (2023). Reformasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan untuk Konservasi



- Ekosistem dan Pelestarian Budaya di Bali. *Jurnal Pacta Sunt Servada*, 4(September), 63–75.
- Sihombing, S. N. (2023). Urgensi Reformulasi Kebijakan Pariwisata Bali Dalam Menjawab Tantangan Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4, 55–62.
- Tamrin, M. H., Muhafidin, D., Nurasa, H., & Muhtar, E. A. (2024). Stakeholders analysis of tourism governance in Dalegan beach ecotourism , East Java , Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(3), 1–15.
- Tirta, I. M. D. (2023). Dinamika Lingkungan Dalam Religio Politik Di Bali. *Widya Dana Jurnal Penelitian Agama Dan Kebudayaan*, 1(2), 151–160.